

**Judul** : DPR Masih menimbang implikasi politik  
**Tanggal** : Jumat, 07 November 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## DPR Masih Menimbang Implikasi Politik

Badan Legislatif masih menunggu keputusan pimpinan DPR terkait revisi UU MD3 sebagai tindak lanjut dari putusan MK tentang kuota 30 persen perempuan di kursi pimpinan AKD.

**JAKARTA, KOMPAS** – DPR belum juga memutuskan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kuota 30 persen perempuan di kursi pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD. Lembaga legislatif itu masih menimbang implikasi politik yang mungkin terjadi bila kursi pimpinan AKD dirombak. Penerapan putusan MK itu pun ditengarai akan alot karena bergantung pada kepentingan di internal tiap-tiap partai politik di parlemen.

MK telah memerintahkan DPR menata ulang komposisi seluruh AKD agar mencerminkan keterwakilan perempuan. Tidak hanya pada keanggotaan, komposisi pimpinan AKD juga harus memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan.

Partai-partai politik di parlemen telah menyatakan siap menindaklanjuti putusan MK tersebut. Namun, hingga Kamis (6/11/2025), DPR belum memutuskan tindak lanjut dari putusan MK tersebut, termasuk kemungkinan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, implementasi putusan MK yang memerintahkan penataan ulang komposisi pimpinan AKD dengan menyertakan perempuan minimal 30 persen tentu akan memiliki implikasi yang luas. Oleh karena

itu, diskusi dan kajian mendalam harus dilakukan baik bersama dengan pimpinan DPR maupun para pimpinan fraksi partai politik di DPR.

Diskusi antarpimpinan DPR itu juga bisa saja menyinggung kemungkinan merevisi UU MD3 sebagai implikasi dari putusan MK tersebut. Sebab, dengan merevisi UU MD3 itu, berarti pengaturan 30 persen perempuan di pimpinan AKD juga akan berlaku secara formal di MPR, DPD, hingga DPRD.

"Tentu saja saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain, implikasinya seperti apa, karena, kan, pasti akan ada implikasi yang lain, dan ya baru kita akan rapatkan dengan teman-teman ketua fraksi dan pimpinan fraksi yang lain," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

### Revisi UU MD3

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Bob Hasan menambahkan, revisi UU MD3 tentu akan memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan mengikat, tidak hanya di DPR, tetapi juga sampai ke DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun, sampai saat ini, belum ada keputusan mengenai revisi UU MD3 tersebut. Baleg masih menunggu keputusan dari pimpinan DPR.

"Nanti kita tunggu bagaimana pimpinan DPR dalam hal ini untuk mencoba menyikapi ter-

hadap putusan MK tersebut, bagaimana dengan keterwakilan perempuan 30 persen dari itu, kemudian implementasinya terutama di DPR," ujarnya.

Bob Hasan mengakui, tantangan terbesar dari penerapan putusan MK yakni pada implikasi politiknya. Keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan AKD sangat erat berkaitan dengan kebijakan di internal parpol. Bagaimanapun, partai politik yang akan menentukan siapa yang bakal duduk di kursi pimpinan AKD tersebut.

"Dan itu semuanya dari partai politik yang menjadi fraksi di DPR. Itu semuanya tentunya ada alurnya. Tetapi, kemudian ketika berproses di DPR ini, kita harus menunggu sikap dari pimpinan," ucapnya.

### Butuh kebesaran hati

Perwakilan Presidium Kaukus Perempuan Parlemen, Nurul Arifin, dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast "Gercep" di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis, mengatakan, penerapan ketentuan keterwakilan 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD pasti akan menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak. Ia tidak memungkiri, jika putusan itu dijalankan, akan menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

"Banyak juga yang terganggu, yang harusnya jatah mereka

malah jadi hilang. Dan sekarang dengan putusan MK, tentu ini seperti kita 'mencuri' lahannya mereka. Dan pastilah ada sinisme-sinisme itu. Dan, menurut saya, sinisme-sinisme itu anggap saja biasa. Toh, antarlaki-laki juga berperang. Kalau kita masuk, kenapa harus takut?" tuturnya.

Catatan Kompas, DPR periode 2024-2029 memiliki 20 AKD yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan, selain satu perangkat pimpinan. Dari total 20 AKD, setengahnya atau 10 AKD tidak memiliki satu pun pimpinan perempuan. Di sejumlah AKD lainnya, hanya ada satu perempuan di kursi pimpinan. Bahkan, di jajaran pimpinan DPR, dari lima orang, hanya ada satu perempuan, yakni Puan Maharani yang menjabat Ketua DPR.

Total perempuan yang ada di pimpinan AKD dan pimpinan DPR adalah 18 orang dari total setidaknya 105 kursi pimpinan AKD. Padahal, di periode ini jumlah perempuan anggota legislatif mencapai 127 orang atau 21,9 persen dari total 580 anggota DPR. Jumlah itu sekaligus yang tertinggi dalam lima kali pemilu pasca-Reformasi 1998.

Sebenarnya, kata Nurul, para anggota legislatif perempuan di DPR punya kapasitas yang mumpuni, termasuk dalam memimpin AKD. Ketika diberi tantangan, mereka akan memper-

lihatkan jati diri dan kemampuannya.

"Teman-teman perempuan di DPR memang masih ada yang malu-malu atau takut. Tapi, ya, belajar saja. Setiap orang punya ciri khas, semua punya opini dan pemikiran, ada yang artikulatif, ada yang tidak. Mungkin mampu, tetapi tidak percaya diri untuk berbicara. Namun, kelihatannya pelan-pelan mereka mulai berani. Saya sendiri kadang mengikuti cara laki-laki, *ngomong* saja dulu," ujarnya.

Nurul meyakini, partainya, yakni Partai Golkar, sangat terbuka dan tidak keberatan menerapkan putusan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan sejauh mana partainya akan mendukung pelaksanaan dan rotasi jabatan untuk mengimplementasikan putusan MK tersebut.

Menurut dia, dibutuhkan kebesaran hati semua anggota dan pimpinan fraksi partai politik agar putusan MK itu benar-benar bisa diterapkan.

"Sekali lagi, ini butuh kebesaran hati, kebijaksanaan, dan butuh pengawalan. Artinya, dikawal oleh *civil society* juga. Periode DPR sekarang, kan, masih punya waktu empat tahun di DPR. Kalau terguwah, *positive thinking*, harusnya semua pihak bisa menyambut putusan ini dengan sukacita," kata Nurul. (BOW/DYT)